



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Maret 2019/Periodik - 2018)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU
SUB UNIT KERJA : PENGADILAN AGAMA PEKANBARU

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **MARDANIS**
2. Jabatan : **HAKIM**
3. NHK : **7865**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN****Rp. 347.500.000**

1. Tanah Seluas 1200 m2 di KAMPAR, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 102 m2/36 m2 di KOTA PEKANBARU, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
3. Tanah Seluas 525 m2 di KAMPAR, HASIL SENDIRI Rp. 37.500.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**Rp. 195.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA RUSH JEEP Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
3. MOTOR, HONDA BEAT SPD MOTOR SOLO Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 17.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA**Rp. 1.100.000****D. SURAT BERHARGA****Rp. ----****E. KAS DAN SETARA KAS****Rp. 10.516.921****F. HARTA LAINNYA****Rp. ----****Sub Total****Rp. 554.116.921****III. HUTANG****Rp. 70.580.808****IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)****Rp. 483.536.113**

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **20 Juni 2019**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.